

**PERSPEKTIF KONFLIK MENGENAI SEKOLAH GRATIS ATAU
SEKOLAH DIBANTU BOS :**

Sebuah Evaluasi Kebijakan

Oleh:

Nanang Martono

email: nanang_martono@yahoo.co.id

Staf Pengajar Jurusan Sosiologi FISIP Unsoed Purwokerto

ABSTRACT

This article analyzes the free education policy through the conflict perspective. According to the conflict perspective, free schooling can increase the assessed social inequality in society. This inequality can occur either between individuals or between state and private schools. On the other hand, conflicts can also occur between state schools (free) with national and international standard schools. Free school policy in practice only be able to overcome the problem of equitable access to education, but has not been able to seek equitable distribution of education quality. Free school policy should be accompanied by improved economic levels of society. The concept of free schooling for the poor should be applied and not applied equally to all primary schools.

Keywords: *free school, conflict perspective, the equitable distribution of quality.*

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis kebijakan sekolah gratis melalui perspektif konflik. Menurut perspektif konflik, sekolah gratis dinilai dapat meningkatkan ketidaksetaraan sosial dalam masyarakat. Ketidaksetaraan ini dapat terjadi baik antarindividu maupun antara sekolah negeri dan swasta. Di sisi lain, konflik juga dapat terjadi antara sekolah negeri (gratis) dengan sekolah bertaraf nasional dan internasional. Kebijakan sekolah gratis dalam praktiknya hanya mampu mengatasi masalah pemerataan akses pendidikan, namun belum dapat mengupayakan pemerataan kualitas pendidikan. Kebijakan sekolah gratis seharusnya diiringi dengan perbaikan taraf ekonomi masyarakat. Konsep sekolah gratis harus diberlakukan bagi masyarakat miskin dan bukan diberlakukan sama rata untuk semua sekolah dasar.

Kata Kunci: sekolah gratis, perspektif konflik, pemerataan kualitas.

PENDAHULUAN

Sekolah gratis atau yang dibantu BOS merupakan kebijakan pemerintah yang saat ini pantas mendapat dukungan. Kebijakan ini dikeluarkan sebagai realisasi kenaikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Keberadaan sekolah gratis di tengah-tengah masyarakat diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses fasilitas pendidikan yang terjangkau dengan adanya sekolah gratis ini. Berbeda dengan masa sebelumnya ketika sekolah negeri masih mematok biaya yang cukup mahal bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Kondisi masyarakat Indonesia sebagian besar masih berada di bawah garis kemiskinan, sehingga kehadiran sekolah gratis memberikan angin segar bagi mereka. Mobilitas sosial penduduk dapat semakin meningkat dengan dukungan fasilitas pendidikan yang terjangkau. Sekolah gratis ini juga diharapkan dapat dinikmati oleh anak-anak dari semua kalangan yang masih menjadi tanggungan orang tua.

Sekolah gratis atau sekolah yang dibantu BOS memang sangat membantu masyarakat yang berasal dari kelas bawah. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pendidikan dijamin oleh negara. Akan tetapi, berbagai kalangan justru meragukan realisasi kebijakan ini. Pemerintah demi mewujudkan sekolah gratis ini telah mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang tidak sedikit untuk setiap sekolah negeri untuk tingkat SD dan SMP. Realisasi kebijakan sekolah gratis memang masih mengalami berbagai kendala, dana yang dibutuhkan sangat besar. Secara ekonomis, pemerintah sebenarnya belum mampu merealisasikan kebijakan ini secara penuh. Akan tetapi, kebijakan yang masih dalam “perencanaan” ini harus mendapat dukungan dari masyarakat.

Namun, bukan berarti kelahiran kebijakan ini tidak menimbulkan masalah. Artikel ini berupaya menjelaskan permasalahan seputar kebijakan sekolah gratis ini dari kacamata sosiologi, baik secara teoritis maupun praktis. Setiap kebijakan yang

digulirkan pemerintah, memang tidak lepas dari pro dan kontra, namun artikel ini tidak mempermasalahkan pro dan kontra tersebut. Permasalahan yang coba untuk digali adalah apakah dengan kebijakan sekolah gratis, asas atau prinsip meritokrasi (pemerataan) dalam pendidikan dapat terwujud secara maksimal? Artinya, apakah dengan sekolah gratis, seluruh kelompok masyarakat dapat memperoleh fasilitas pendidikan yang tidak diskriminatif, baik secara *kuantitas* maupun *kualitas*?

TINJAUAN PUSTAKA

Sekolah Gratis: Tinjauan Sosiologis

Pandangan sosiologis memfokuskan diri pada permasalahan implementasi kebijakan di lapangan. Sosiologi lebih terfokus pada kondisi riil yang terjadi dalam masyarakat. Ada dua perspektif atau sudut pandang yang dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan sekolah gratis ini, yaitu perspektif fungsional dan perspektif konflik.

Perspektif fungsional. Perspektif ini mengambil analogi masyarakat sebagai sebuah sistem organik (makhluk hidup), sebagai contoh adalah organisme manusia. Manusia merupakan sebuah sistem biologis yang terdiri atas sub-subsistem. Keseluruhan bagian tersebut harus berfungsi dengan baik sesuai tugas dan perannya masing-masing. Masing-masing tugas dan peran subsistem tersebut tidak dapat saling menggantikan. Apabila terdapat salah satu bagian tidak berfungsi dengan baik, maka manusia tersebut mengalami kondisi abnormal, atau mengalami kondisi “sakit” (Martono, 2010).

Berkaitan dengan masalah pendidikan, ada dua pertanyaan yang saling berhubungan yang memandu kaum fungsionalis menganalisis masalah pendidikan: *pertama*, apa fungsi pendidikan bagi masyarakat secara keseluruhan? Pertanyaan yang diberikan kaum fungsionalis ini mengarah pada pendidikan sebagai kebutuhan sistem sosial, misalnya, kontribusi yang pendidikan dalam memelihara konsensus nilai dan solidaritas sosial. Kedua, apa hubungan fungsional antara pendidikan dengan bagian sistem sosial yang lain? Pertanyaan ini mengarah pada pembahasan

mengenai hubungan antara pendidikan dengan sistem ekonomi, sistem politik, budaya dan sebagainya serta pemikiran mengenai bagaimana hubungan ini akan membantu mengintegrasikan masyarakat secara keseluruhan (Henslin, 2006; Haralambos and Holborn, 2004).

Ada dua aspek yang dapat digunakan untuk menganalisis praktik sekolah gratis dari perspektif ini. *Pertama*, sekolah gratis bersifat fungsional, artinya sekolah gratis memiliki fungsi positif. Kebijakan sekolah gratis digulirkan bukan tanpa alasan atau tujuan positif. Beberapa tujuannya antara lain: untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional; membuka kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara untuk mengakses fasilitas pendidikan yang disediakan pemerintah, sehingga nantinya dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah. *Kedua*, hubungan antarsubsystem. Sekolah gratis hanyalah sebagian kecil subsystem dalam masyarakat. Artinya, keberhasilan implementasi kebijakan sekolah gratis ini tetap dipengaruhi oleh komponen lain dalam masyarakat. Misalnya kesiapan masyarakat untuk menerima kebijakan ini, kesiapan pihak sekolah dalam memanfaatkan dana BOS, termasuk dalam mekanisme transparansi penggunaan BOS serta kemampuan pihak sekolah dalam menyesuaikan perubahan berkaitan dengan masalah penggunaan dana BOS.

Perspektif konflik. Perspektif ini memiliki pandangan yang bertolak belakang dengan perspektif fungsional. Perspektif konflik menekankan adanya perbedaan pada diri individu dalam mendukung suatu sistem sosial. Menurut perspektif konflik masyarakat terdiri atas individu yang masing-masing memiliki berbagai kebutuhan yang tidak terbatas. Namun, kemampuan individu untuk mendapatkan kebutuhanpun berbeda-beda sehingga menyebabkan terjadinya ketidaksetaraan sosial di dalam masyarakat (Martono, 2010). Menurut perspektif ini, sekolah justru memiliki fungsi negatif. Sekolah dimaknai sebagai sistem yang memperlebar adanya ketidaksetaraan (*inequality*) antarkelas sosial dalam masyarakat (Haralambos and Holborn, 2004). Perspektif ini lebih melihat fungsi negatif akibat berlakunya kebijakan sekolah gratis. Fungsi negatif ini bukan berarti kebijakan sekolah gratis berdampak negatif bagi masyarakat, melainkan kebijakan ini dalam

praktiknya tetap memiliki eksese-eksese atau implikasi negatif bagi masyarakat. Sebagaimana sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, perspektif ini lebih melihat kontribusi lembaga pendidikan yang lebih berfungsi menciptakan ketidaksetaraan dan atau memicu terjadinya konflik sosial dalam masyarakat. Bagaimana sekolah gratis dapat menciptakan ketidaksetaraan dan konflik?

Pierre Bourdieu: Sekolah dan Dominasi Kelas

Bourdieu memberikan cara-cara yang penting untuk mempertimbangkan hubungan antara pendidikan dengan reproduksi dan mekanisme sosial tempat inklusi dan eksklusi sosial diciptakan dalam medan relasional sebagai fakta sosiologis serta historis. Pendidikan bagi Bourdieu, hanyalah sebuah alat untuk mempertahankan eksistensi kelompok dominan. Sekolah pada dasarnya hanya menjalankan proses reproduksi budaya (*cultural reproduction*), sebuah mekanisme sekolah, dalam hubungannya dengan institusi yang lain, untuk membantu mengabadikan ketidaksetaraan ekonomi antargenerasi (Giddens, 2006). Kelompok dominan mempertahankan posisinya melalui *hidden curriculum*, sekolah memengaruhi sikap dan kebiasaan siswa dengan menggunakan budaya kelompok dominan (kelompok atas). Kelompok dominan memaksakan kelompok bawah untuk bersikap dan mengikuti budaya kelompok dominan melalui sekolah. Sekolah menerapkan budaya kelompok dominan dalam setiap aktifitasnya. Siswa dari latar belakang kelompok bawah (kelompok minoritas di sekolah) mengembangkan cara berbicara dan bertindak yang biasa digunakan kelompok dominan.

Menurut Bourdieu, sebagian kelompok telah menggunakan sekolah sebagai alat untuk mempertahankan posisinya, dan sebagian kelompok yang lain tidak mampu meraih posisi yang lebih baik melalui sekolah ini. Ketika sekelompok orang berupaya memberikan kemudahan akses bagi kelompok bawah dengan menggunakan sistem meritokrasi, maka kelompok dominan tetap berupaya mempertahankan posisinya dengan menciptakan mekanisme (dalam bentuk sistem maupun perangkat-perangkat baru) agar kelompok bawah tetap tidak mampu menyamai kedudukannya.

Perangkat-perangkat ini sengaja diciptakan agar pendidikan tetap bersifat eksklusif bagi kelompok dominan. Dengan demikian, kelompok dominan dapat terus menerus mempertahankan dominasinya (Bourdieu, 2004; Harker, 2004).

Sekolah, dengan demikian akan selalu menciptakan ketidaksetaraan sosial dalam masyarakat. Bagaimanapun juga, meskipun sistem pendidikan memberikan akses seluas-luasnya bagi semua golongan, namun sistem ini tetap tidak akan menguntungkan bagi kelompok bawah. Hal ini dikarenakan kelompok kelas atas memiliki modal budaya yang jauh melebihi kapasitas kelas bawah. Bagi Bourdieu, peserta didik dari kelas atas lebih diuntungkan karena kepemilikan kapital budaya. Mereka beruntung berkat asal keluarga yang memungkinkan bukan hanya mendapatkan kebiasaan budaya (membaca, menulis, diskusi), latihan-latihan dan sikap yang langsung membuat mereka lebih siap bersaing di sekolah. Mereka juga mewarisi pengetahuan dan keterampilan, serta selera yang sangat mendukung pengembangan budaya yang dituntut oleh sistem pendidikan sekolah (Harker, 2004). Privilese budaya ini mengemuka karena familiaritas mereka dengan karya-karya seni dan sastra berkat kunjungan teratur mereka ke museum, nonton teater dan konser serta kegiatan sejenis lainnya.

Bagi peserta didik yang berasal dari kelas sosial miskin satu-satunya akses ke budaya adalah sekolah. Bagi lapisan kelas miskin sekolah merupakan bentuk akulturasi budaya. Perilaku di dalam budaya universitas mengandaikan isi dan modalitas proyek profesional yang merupakan budaya kelas atas. Pengajaran budaya mengandaikan *corpus* pengetahuan, keterampilan termasuk dalam wicara yang biasanya dimiliki oleh kaum terdidik. Kebiasaan membaca tumbuh di perpustakaan rumah, kapital budaya berkembang dengan pembiasaan melihat pertunjukan-pertunjukkan pilihan yang berkualitas. Kemampuan percakapan yang bersifat alusif yang hanya dapat ditangkap oleh mereka yang terdidik berkembang dalam kalangan sosial tertentu. Warisan budaya seperti itu biasanya diwariskan secara tidak langsung, penuh diskresi, bahkan dapat dikatakan tanpa upaya metodis atau tindakan yang kelihatan karena telah menjadi bagian dari habitus kalangan terdidik. Maka tidak

mengherankan bila bagi kalangan elite, pendidikan merupakan kelanjutan kelangsungan pewarisan budaya dan bagian dari strategi kekuasaan, sedangkan untuk kelas miskin sekolah merupakan simbolisasi akses ke kalangan elite. Sekolah menjadi satu-satunya yang mampu menjanjikan harapan keberhasilan sosial, sedangkan untuk kalangan atas sistem pendidikan menjamin pelanggaran *privilege* mereka (Haryatmoko, 2009).

PEMBAHASAN

Masalah Sosial seputar Sekolah Gratis

Kebijakan sekolah gratis tidak sepenuhnya bebas dari masalah sosial yang melingkupinya. Ada beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian dalam penyelenggaraan sekolah gratis ini. Beberapa hal yang dapat menjelaskan efek negatif sekolah gratis dalam masyarakat di antaranya adalah:

Sekolah (negeri) gratis versus sekolah swasta. Sekolah (negeri) gratis merupakan ancaman bagi sekolah swasta yang berbiaya mahal. Akibat adanya kebijakan ini, setiap siswa berbondong-bondong masuk ke sekolah negeri yang tidak dipungut biaya. Sekolah gratis hanya berlaku di sekolah negeri, sedangkan pemerintah belum memiliki anggaran untuk menggratiskan sekolah swasta. Ini artinya, ada kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta, ada kecemburuan sosial antarpersonal yang terlibat dalam proses pendidikan di dua tempat tersebut. Ketika sebagian besar orang mengejar sekolah negeri (yang gratis), maka dapat dipastikan sekolah swasta akan kekurangan jumlah siswa. Jika ini yang terjadi, pengelola sekolah swasta akan sulit lagi untuk mempertahankan keberadaannya. Jika kebijakan sekolah gratis ini dipertahankan, dalam beberapa tahun ke depan akan banyak sekolah swasta yang tutup.

Sekolah gratis versus SBN dan SBI. Pada intinya, dikotomi kedua sekolah ini memiliki implikasi yang sama dengan sekolah gratis dan sekolah swasta. Namun, dikotomi ini memiliki eksese yang lebih urgen, bila SBN (Sekolah Berstandar Nasional) dan SBI (Sekolah Berstandar Internasional) belum digratiskan maka dapat

disimpulkan bahwa SBN dan SBI hanya ditujukan untuk masyarakat dari golongan menengah ke atas saja. Pada akhirnya SBN dan SBI menjadi Sekolah *Bertarif* Nasional dan Sekolah *Bertarif* Internasional yang sangat mahal dan eksklusif. Kebijakan sekolah gratis hanyalah sebuah kamufase belaka, suatu mekanisme untuk meredam konflik atau protes akibat mahalnya biaya pendidikan. Sekolah gratis hanyalah candu bagi masyarakat miskin. Bila ada SBN dan SBI, masalahnya kemudian adalah sekolah gratis dalam proses pembelajarannya akan menggunakan standar apa?

Perubahan tingkat kesejahteraan guru. Pemberlakuan sekolah gratis yang kemudian seluruh biaya pendidikan diganti dalam bentuk BOS (Bantuan Operasional Sekolah), menyebabkan terjadinya penurunan insentif yang diterima guru di sekolah gratis. Dana BOS pada intinya digunakan untuk membiayai komponen yang mendukung kegiatan akademik. BOS digunakan untuk biaya penerimaan siswa baru, buku referensi, buku teks pelajaran, pembelajaran (remedial, pengayaan, olahraga, kesenian), ujian, pembelian bahan-bahan habis pakai, pembiayaan langganan daya listrik dan atau air, pembiayaan perbaikan sekolah, pembayaran honorarium, pengembangan profesi guru dan pelatihan, biaya transpor siswa miskin, pembiayaan pengelolaan bantuan operasional sendiri, serta pembelian perangkat komputer. Dana yang terbatas tersebut menyebabkan dana untuk insentif guru menjadi berkurang. Insentif merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kinerja seorang guru. Logika ini memang tidak dapat dibalik, artinya kenaikan insentif tidak secara otomatis mampu meningkatkan kualitas kinerja guru. Hal ini dapat disiasati dengan memberikan insentif secara distributif, misalnya melalui sertifikasi. Namun proses penilaian sertifikasi harus dibenahi terlebih dahulu. Bila masalah insentif ini diabaikan, besar kemungkinan yang akan terjadi adalah terjadinya penurunan kualitas sekolah negeri yang gratis. Sekolah gratis hanya semata-mata ditujukan untuk meningkatkan kuantitas angka partisipasi sekolah saja, namun mengabaikan faktor kualitas proses pendidikan itu sendiri yang sebenarnya harus menjadi perhatian. Dampak selanjutnya adalah, dalam beberapa tahun kemudian, sekolah gratis hanya

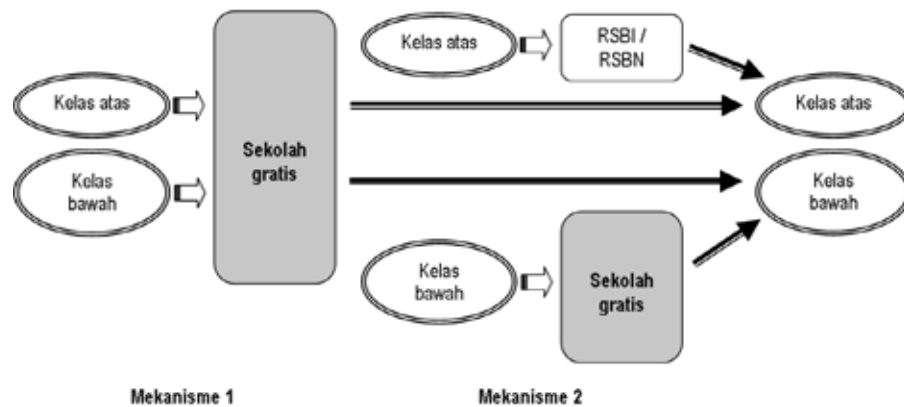
melahirkan banyak siswa yang tidak berkualitas karena dididik oleh guru yang memiliki kinerja yang rendah.

Sekolah Gratis: antara Pemerataan dan Ketidaksetaraan

Sekolah gratis, berdasarkan uraian sebelumnya ternyata tidak bebas dari masalah. Sekolah gratis bukanlah solusi jitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Memang dari segi kuantitas, angka partisipasi sekolah dapat didongkrak naik dengan memberikan fasilitas gratis yang dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan masyarakat. Dari segi kualitas, kebijakan sekolah gratis masih perlu mendapat perhatian serius.

Bourdieu melihat bahwa sekolah pada dasarnya digunakan sebagai alat (mekanisme) melanggengkan dominasi kelas atas. Kelas atas, dalam hal ini menggunakan sekolah sebagai sarana mempertahankan posisinya, sekolah dimanfaatkan secara eksklusif, sekolah lebih banyak melayani kebutuhan kelas atas daripada kelas bawah. Berbagai budaya kelas atas disosialisasikan dalam sekolah, yang menyebabkan posisi kelas bawah menjadi termarginalkan karena di sekolah mereka dipaksa untuk mengikuti budaya kelas atas. Ketika sekelompok orang berupaya memberikan kemudahan akses bagi kelompok bawah dengan menggunakan sistem meritokrasi, maka kelompok dominan tetap berupaya mempertahankan posisinya dengan menciptakan mekanisme (dalam bentuk sistem maupun perangkat-perangkat baru) agar kelompok bawah tetap tidak mampu menyamai kedudukannya. Perangkat-perangkat ini sengaja diciptakan agar pendidikan tetap bersifat eksklusif bagi kelompok dominan. Kelompok dominan, dengan demikian, dapat terus menerus mempertahankan dominasinya. Mekanisme untuk mempertahankan posisi tersebut salah satunya dilakukan dengan membuka RSBI (yang kemudian menjadi SBI) dan RSN (yang kemudian menjadi SBN) mengingat pemerintah belum menggratiskan kedua tipe sekolah ini. Munculnya RSBI dan RSN merupakan sebuah mekanisme bagi kelas atas untuk mempertahankan posisinya. Artinya, mereka ingin mempertahankan agar sekolah yang berkualitas tetap bersifat eksklusif, kelas bawah

cukup mengakses sekolah gratis yang kualitasnya dipertanyakan. Sekolah berkualitas adalah sekolah milik kelas atas. Mekanisme ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Mekanisme dominasi kelas atas melalui sekolah

Fenomena ini sebenarnya merupakan sebuah kontradiksi, dua kebijakan yang saling berlawanan. Mengapa di saat pemerintah menggulirkan kebijakan sekolah gratis ternyata di sisi lain pemerintah justru memunculkan konsep SBN dan SBI yang tidak gratis dan tentu saja secara kualitas lebih bermutu dibandingkan sekolah gratis. Ini artinya pemerintah telah mengeksklusifkan lembaga pendidikan itu sendiri. Masyarakat kelas atas dapat dengan mudah mengakses sekolah bertipe SBI atau SBN yang berkualitas, sedangkan kelas bawah “dipersilakan” atau bahkan “dipaksa” mengambil dan menikmati sekolah gratis. Kesimpulannya, hanya kelas atas saja yang diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas. Dampak selanjutnya adalah, karena sekolah bertipe SBI dan SBN masih diberi kesempatan untuk memungut biaya dari siswa, maka nantinya setiap sekolah akan berlomba-lomba untuk dapat menaikkan statusnya menjadi SBI atau SBN. Sudah dipastikan, masyarakat kelas bawah akan kembali kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan gratis. Ada kemungkinan bahwa sekolah dengan sengaja menaikkan statusnya menjadi SBI atau SBN sebagai dalih untuk tidak menggratiskan biaya

sekolah. SBI dan SBN pada akhirnya bukanlah simbol prestasi, melainkan hanya menjadi simbol prestise. SBI dan SBN kemudian menjadi Sekolah *Bertarif* Internasional dan Sekolah *Bertarif* Nasional yang tentu saja sangat mahal. Anak orang miskin, tetap saja menjadi miskin, mereka hanya mampu bersekolah di sekolah yang tidak memiliki standar apapun.

Sekolah Gratis dan Pemerataan Prestasi

Masalah berikutnya yang sangat penting adalah, apakah dengan mekanisme sekolah gratis, dengan memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat kelas bawah untuk mengakses pendidikan kemudian dapat berdampak pada pemerataan kualitas individu? Dengan kata lain, dapatkah individu dari kelas bawah mampu menyamai prestasi individu dari kelas atas di sekolah gratis ini?

Bourdieu kembali menjelaskan bahwa kelas atas juga berupaya mempertahankan posisi dominannya dengan modal budaya yang dimilikinya, yang kemudian modal budaya ini diwujudkan dalam lembaga pendidikan (sekolah). Kelas atas dan kelas bawah tentu saja memiliki modal budaya yang berbeda. Bagaimanapun juga, meskipun sistem pendidikan memberikan akses seluas-luasnya bagi individu dari kelas manapun, namun sistem ini tetap tidak akan menguntungkan bagi kelompok bawah. Hal ini dikarenakan kelompok kelas atas memiliki modal budaya yang jauh melebihi kapasitas individu kelas bawah. Bagi Bourdieu, peserta didik dari kelas atas lebih diuntungkan karena kepemilikan kapital budaya. Mereka beruntung berkat asal keluarga yang memungkinkan bukan hanya mendapatkan kebiasaan budaya (membaca, menulis, diskusi), latihan-latihan dan sikap yang langsung membuat mereka lebih siap bersaing di sekolah. Mereka juga mewarisi pengetahuan dan keterampilan, serta selera yang sangat mendukung pengembangan budaya yang dituntut oleh sistem pendidikan sekolah. Warisan budaya seperti itu biasanya diwariskan secara tidak langsung, penuh diskresi, bahkan dapat dikatakan tanpa upaya metodelis atau tindakan yang kelihatan karena telah menjadi bagian dari habitus kalangan terdidik. Untuk peserta didik yang berasal dari kelas sosial miskin satu-

satunya akses ke budaya adalah sekolah (Haryatmoko, 2009). Sekolah gratis, dengan demikian tetap memunculkan ketidaksetaraan sosial.

Individu kelas atas juga didukung oleh kualitas gizi yang sangat baik karena mereka tidak mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kelas bawah adalah sebaliknya, dari faktor gizi, mereka berbeda dengan kelas atas. Bagaimana mungkin dengan modal kualitas gizi yang berbeda, kedua kelas tersebut mampu menghasilkan prestasi yang sama. Sekolah gratis tetap saja menyebabkan ketidaksetaraan, bukan meritokrasi. Meskipun meritokrasi dari segi kuantitas dapat tercapai, namun meritokrasi dari aspek kualitas akan sulit diwujudkan.

Bowles dan Gintis (1976), penganut teori konflik menolak pandangan yang memandang bahwa sistem pendidikan melalui mekanisme sekolah gratis ini bersifat meritokratis. Bowles dan Gintis juga menyangkal bahwa pendidikan hanya menjadi instrumen kelompok kapitalis. Bowles dan Gintis yakin bahwa latar belakang kelas (sosial) sangat penting sebagai faktor yang memengaruhi prestasi. Bagi mereka, pandangan yang menyatakan bahwa setiap individu dapat bersaing secara seimbang di sekolah, hanyalah sebuah ilusi.

Bowles dan Gintis (1976) melakukan sebuah studi mengenai hubungan tingkat kecerdasan (IQ) dengan prestasi belajar siswa di sekolah. Hasil studi mereka menunjukkan bahwa ada hubungan langsung antara prestasi pendidikan dan latar belakang keluarga. Faktor penyebab tingginya prestasi belajar bukanlah IQ, melainkan posisi kelas orang tua siswa. Secara umum, orang yang berasal dari kelas yang lebih tinggi, semakin besar peluang mereka menempuh pendidikan dan kualifikasi mereka juga lebih tinggi.

Akan tetapi, mengapa siswa dengan kualifikasi tinggi cenderung memiliki kecerdasan di atas rata-rata? Bowles dan Gintis berpendapat bahwa hubungan ini sebagian besar adalah sebuah “keuntungan yang diperoleh secara kebetulan, hanya efek samping” dalam pendidikan. Semakin lama seorang individu berada dalam sistem pendidikan, maka IQ-nya akan semakin berkembang. Namun demikian, IQ merupakan konsekuensi dari lamanya individu mengenyam pendidikan, bukan faktor

penyebab. Hal tersebut membawa Bowles dan Gintis pada kesimpulan bahwa, IQ hanya memiliki peran yang sedikit, maka sistem pendidikan tidak berfungsi sebagai sistem meritokratik (Bowles and Gintis, 1976). Bila hasil studi mereka digambarkan dalam hubungan geometris, maka akan nampak hubungan ketiga komponen sebagai berikut:



Gambar 2. Kelas sosial, IQ dan Prestasi belajar

Gambar 2 menunjukkan bahwa IQ merupakan produk dari kelas sosial. Untuk itu, kelas sosial merupakan faktor pendahulu yang memengaruhi tingkat kecerdasan individu. Sistem meritokrasi dalam pendidikan di dalamnya tetap mempertahankan ketidaksetaraan sosial yang menguntungkan kelompok kelas atas.

Dengan demikian, meskipun di sekolah gratis siswa dari kelas miskin dan kaya diberikan kesempatan yang sama untuk berprestasi, namun tetap saja kelompok kelas atas akan mendominasi prestasi di sekolah. Kelompok siswa dari kelas miskin tetap berada di posisi bawah dalam prestasi belajarnya. Ketika siswa dari kelas miskin memiliki prestasi yang rendah, maka hal ini akan membawa mereka pada kegagalan dalam mencapai pekerjaan yang layak yang mampu meningkatkan status orang tua mereka. Kelompok kelas miskin pada akhirnya menghasilkan kelompok kelas miskin kembali (Gambar 1).

Perlunya Reformulasi Kebijakan

Mewujudkan sekolah gratis tanpa diskriminasi bukanlah sebuah pekerjaan mudah. Sistem pendidikan adalah sebuah sistem, dan sekaligus sebagai subsistem. Artinya adalah sistem pendidikan juga sangat bergantung pada bekerjanya sistem yang lain di luar sistem pendidikan. Konsep *sekolah gratis* bila dikaitkan dengan konsep *pemerataan pendidikan* memang merupakan sebuah hal yang sangat relevan dalam pandangan orang awam. Sekolah gratis mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh anggota masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Sekolah gratis memberi harapan baru bagi mereka yang selama ini hanya menggigit jari dan menggantungkan cita-citanya mengenyam pendidikan. Pemikiran semacam ini adalah sebuah pemikiran yang sempit dan terlalu menyederhanakan permasalahan, seolah-olah masalah pendidikan akan selesai dengan memberikan pendidikan gratis.

Banyaknya masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan adalah pekerjaan rumah yang sangat sulit untuk diatasi. Pendidikan dan kondisi ekonomi adalah dua faktor yang memiliki kedudukan yang sejajar. Dua faktor tersebut saling memengaruhi. Untuk itu, kedua komponen tersebut harus diperhatikan secara bersamaan tanpa mempertimbangkan mana yang harus didahulukan, mana yang dinomorduakan. Pendidikan adalah kunci perubahan sekaligus kunci peradaban. Tanpa pendidikan, kemajuan peradaban suatu bangsa sulit untuk diraih.

Permasalahan yang harus dikaji adalah lebih dari sekedar “bagaimana cara memberikan akses pendidikan yang seluas-luasnya kepada masyarakat” namun permasalahan selanjutnya adalah “bagaimana mewujudkan kesetaraan sosial dan kesetaraan status melalui pendidikan ini; bagaimana memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat kelas bawah untuk mampu bersaing dengan kelas atas?”. Untuk menjawab masalah ini, hal yang harus diperhatikan adalah pemerintah harus memberikan jaminan tentang kemudahan bagi masyarakat kelas bawah untuk mengakses pendidikan yang berkualitas, tanpa membedakannya dengan kelas atas. Perbaikan kualitas peserta didik harus didukung dengan komponen lain, misalnya adalah kualitas gizi, fasilitas penunjang pendidikan yang dapat dimanfaatkan oleh semua siswa tanpa membedakan golongan. Komponen tersebut adalah komponen yang secara langsung memengaruhi keberhasilan siswa.

Idealnya, perbaikan ekonomi dan perbaikan sistem pendidikan harus dilakukan secara bersamaan, karena hubungan kedua aspek tersebut adalah saling terkait satu sama lain. Keduanya harus berjalan beriringan, dengan pendidikan yang maju dan berkualitas, maka derajat ekonomi masyarakat dapat ditingkatkan, sebaliknya, derajat ekonomi dapat ditingkatkan melalui perbaikan sistem pendidikan. Akar masalah sebenarnya berawal dari aspek ini. Kebijakan sekolah gratis tetap tidak

akan mampu meningkatkan status sosial kelas bawah sehingga mampu naik ke kelas atas. Hal ini dikarenakan kelas atas dan kelas bawah memiliki sumber daya yang berbeda. Bila kita menggunakan penjelasan Karl Marx (Johnson, 1994) bahwa faktor ekonomi merupakan faktor sentral yang menentukan keberadaan faktor sosial lain, maka selama kondisi ekonomi kelas bawah tidak sama dengan kelas atas, ketidaksetaraan sosial akan selalu terjadi meskipun keduanya diberi kesempatan yang sama. Kondisi ini tentu berimbas dari ketidaksetaraan komponen modal sosial yang dimiliki kedua kelompok tersebut.

Alternatif berikutnya yang dapat dilakukan pemerintah adalah pemerintah perlu melibatkan sektor swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah gratis. Jalur pendidikan nonformal (Kejar Paket) perlu diberikan posisi yang sejajar dan sama dengan jalur pendidikan formal. Sekolah nonformal dalam kenyataannya masih diposisikan sebagai “*second school*” setelah sekolah formal, akibatnya sekolah nonformal yang kebanyakan dikelola masyarakat, kurang mendapat perhatian penuh dari pemerintah. Selain itu, jalur pendidikan nonformal tidak banyak diminati masyarakat umum. Lulusan sekolah nonformal juga sering mendapat perlakuan yang berbeda dengan lulusan sekolah formal dalam beberapa hal, misalnya dalam masalah studi lanjut dan kesempatan bersaing di dunia kerja.

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan mengembangkan kembali gerakan orang tua asuh (GOTA) yang pernah digencarkan pemerintah Orde Baru. GOTA merupakan solusi masalah pendidikan yang langsung berhubungan dengan pengguna, yaitu siswa dari golongan miskin, sehingga beban pembiayaan pendidikan tidak sepenuhnya ditanggung pemerintah.

PENUTUP

Simpulan

Sekolah gratis adalah sebuah program pemerintah yang diupayakan untuk menyelesaikan masalah pemerataan akses pendidikan. Kebijakan ini juga merupakan upaya merealisasikan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN. Kebijakan sekolah

gratis ini diharapkan akan mampu menyelesaikan masalah akan mahal biaya pendidikan yang banyak dikeluhkan masyarakat terutama dari golongan menengah ke bawah. Kemunculan sekolah gratis ini ternyata bukan menyelesaikan masalah, namun justru memunculkan masalah yang lebih serius. Sekolah gratis mengancam eksistensi sekolah swasta yang berbiaya mahal karena harus menanggung biaya sendiri. Kehadiran sekolah gratis dimungkinkan dapat merugikan sekolah swasta karena masyarakat lebih tertarik menyekolahkan anaknya di sekolah negeri yang gratis. Masalah kedua menyangkut masalah kualitas. Kualitas sekolah gratis sering dipertanyakan masyarakat. Minimnya dana yang disediakan pemerintah menjadi alasan bahwa sekolah tidak mungkin menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dengan biaya yang minim. Konsep sekolah gratis ini dalam kenyataannya disandingkan dengan konsep SBN dan SBI. Akibatnya cita-cita masyarakat kelas bawah untuk memperoleh pendidikan berkualitas hanyalah isapan jempol semata. Sekolah gratis tetap saja sekolah gratis, dan karena gratis tentu saja tidak berkualitas bahkan tidak memakai standar apapun. Sekolah berkualitas tetap saja menjadi lembaga yang eksklusif. Sekolah gratis juga belum menjamin pemerataan kualitas antarpeserta didik, meskipun sekolah gratis dikatakan dapat pemeratakan kesempatan secara kuantitas. Di sekolah gratis, siswa dari kelas miskin prestasi belajarnya tetap berada pada posisi bawah. Hal ini menunjukkan prinsip meritokrasi tetap tidak menjamin kesetaraan prestasi belajar.

Saran

Penyelenggaraan sekolah gratis bagi masyarakat miskin seharusnya diimbangi dengan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat secara umum. Konsep sekolah gratis harus diberlakukan bagi masyarakat miskin dan bukan diberlakukan sama rata untuk semua sekolah dasar. Pada dasarnya, penyelenggaraan pendidikan harus memperhatikan aspek sosiologis masyarakat. Dalam hal ini, masalah pendidikan tidak dapat dimaknai hanya sebatas pemerataan kesempatan untuk mengakses pendidikan, namun harus dimaknai sebagai upaya mengangkat derajat individu secara utuh. Untuk itu, penyelenggaraan sekolah gratis harus mempertimbangkan aspek

kualitas pendidikan itu sendiri. Masyarakat juga harus dilibatkan dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Adanya ketidaksetaraan sosial dalam masyarakat menyiratkan satu hal bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan subsidi silang. Kelompok kaya harus membantu kelompok miskin, dengan demikian diharapkan kesetaraan kesempatan dalam mengakses pendidikan dapat terwujud tanpa ada perbedaan perlakuan antara si kaya dan si miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Bourdieu, P. 2004. "The Forms of Capital", dalam *The Routledge Falmer Reader in Sociology of Education*. Stephen J. Ball (ed.). The Routledge Falmer, London.
- Bowles, S. and Gintis, H. 1976. *Schooling in Capitalist America*. Routledge and Kegan Paul, London.
- Giddens, A. 2006. *Sociology Fifth Edition*. Polity Press, USA.
- Haralambos and Holborn. 2004. *Sociology: Themes and Perspectives Sixth Edition*. Harper Collins Publisher, London.
- Harker, R, et.al (ed). 2004. *(Habitus x Modal) + Ranah = Praktik: Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*. Jalasutra, Bandung (diterjemahkan dari *An Introduction to The Work of Pierre Bourdieu: The Practice Theory* oleh Pipit Maizier).
- Haryatmoko. 2008. *Sekolah: Untuk Semua atau Alat Seleksi Sosial? Reproduksi Kesenjangan Sosial Lewat Sekolah: Perspektif Pierre Bourdieu*, situs: <http://sosiologi.fisipol.ugm.ac.id/handoutseminar/haryatmoko.doc>. diakses tanggal 1 September 2009
- Henslin, J. M. 2006. *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi Edisi 6 Jilid 2*. Erlangga, Jakarta (diterjemahkan dari *Essential of Sociology: a Down-to-earth Approach 6th Edition* oleh Kamanto Sunarto).
- Johnson, D. P. 1990, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid I*, Gramedia, Jakarta (terjemahan dari *Sociolgycal Theory Classical and Contemporary Perspectives* oleh Robert M.Z. Lawang).
- Martono, N. 2010. *Pendidikan Bukan Tanpa Masalah: Mengurai Problematika Pendidikan dari Perspektif Sosiologi*. Gava Media, Jogjakarta.